

Diplomasi Penyeimbang Yordania Pasca-7 Oktober 2023: Menjaga Stabilitas Nasional, Aliansi Strategis, Dan Kepentingan Palestina

Gridzanda Magna Yanudza

Jordan University

*Corresponding email: gridza69@gmail.com

Abstrak: Artikel ini menganalisis strategi diplomasi Yordania setelah pecahnya konflik Gaza pada 7 Oktober 2023. Sebagai negara dengan kemampuan material terbatas, ketergantungan ekonomi terhadap mitra eksternal, hubungan strategis dengan Amerika Serikat, dan perjanjian damai dengan Israel, Yordania menghadapi tekanan untuk mempertahankan stabilitas nasional tanpa mengabaikan posisi historis dan politiknya dalam mendukung Palestina. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana Yordania menyeimbangkan kepentingan keamanan, hubungan strategis, legitimasi domestik, dan komitmennya terhadap Palestina. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui analisis dokumen terhadap pernyataan resmi Pemerintah Yordania, pidato Raja Abdullah II, perjanjian internasional, laporan organisasi internasional, serta literatur akademik yang diterbitkan selama periode 2023–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi penyeimbang Yordania dijalankan melalui tiga instrumen utama. Pertama, diplomasi normatif yang menekankan penghentian perang, penolakan pemindahan paksa warga Palestina, solusi dua negara, dan perlindungan situs suci di Yerusalem. Kedua, diplomasi strategis yang mempertahankan kemitraan keamanan dan ekonomi dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat tanpa sepenuhnya mengikuti kebijakan mereka terhadap Israel. Ketiga, diplomasi kemanusiaan yang menempatkan bantuan kepada Gaza dan perlindungan pengungsi sebagai bagian dari kepentingan nasional dan legitimasi regional Yordania. Artikel ini menyimpulkan bahwa kebijakan Yordania tidak dapat dipahami sebagai netralitas, melainkan sebagai strategi adaptif negara kecil untuk mengelola kepentingan yang saling bertentangan di tengah ketidakpastian regional.

Kata kunci: Yordania, diplomasi penyeimbang, Palestina, negara kecil, kebijakan luar negeri, Timur Tengah.

Abstract: This article examines Jordan's diplomatic strategy following the outbreak of the Gaza conflict on 7 October 2023. As a state with limited material capabilities, substantial economic dependence on external partners, a strategic relationship with the United States, and a peace treaty with Israel, Jordan faces considerable pressure to preserve national stability without abandoning its historical and political commitment to the Palestinian cause. This study seeks to explain how Jordan balances its security interests, strategic partnerships, domestic legitimacy, and support for Palestinian interests. It employs a qualitative case-study approach based on document analysis of official Jordanian statements, speeches by King Abdullah II, international agreements, reports issued by international organisations, and relevant academic literature published between 2023 and 2025. The study finds that Jordan's balancing diplomacy operates through three principal instruments. First, normative diplomacy emphasises an end to the war, opposition to the forced displacement of Palestinians, support for the two-state solution, and the protection of holy sites in Jerusalem. Second, strategic diplomacy preserves Jordan's security and economic partnerships with the United States and other Western countries while maintaining a distinct position on Israeli policies. Third, humanitarian diplomacy integrates assistance to Gaza and refugee protection into Jordan's national interests and regional legitimacy. The article concludes that Jordan's foreign policy should not be understood as passive neutrality, but as an adaptive small-state strategy for managing competing interests amid regional uncertainty.

Keywords: Jordan, balancing diplomacy, Palestine, small state, foreign policy, Middle East.

PENDAHULUAN

Yordania menempati posisi geopolitik yang strategis sekaligus rentan di Timur Tengah karena berbatasan langsung dengan Palestina, Israel, Suriah, Irak, dan Arab Saudi. Meskipun memiliki wilayah, sumber daya alam, kemampuan ekonomi, dan kekuatan militer yang relatif terbatas, Kerajaan Hasyimiyah mampu mempertahankan keberlangsungan negara dan stabilitas pemerintahannya di tengah konflik, revolusi, serta persaingan kekuatan regional (Ponížilová, 2013).

Keterbatasan material tersebut menjadikan diplomasi sebagai instrumen utama dalam kebijakan luar negeri Yordania. Melalui reputasi sebagai negara moderat, kemampuan bernegosiasi, hubungan dengan kekuatan besar, keterlibatan dalam organisasi internasional, serta perannya sebagai penghubung pihak-pihak yang berkonflik, Yordania berusaha

meningkatkan nilai strategisnya sekaligus mengompensasi kelemahan ekonomi dan militernya (Ponížilová, 2013).

Namun, kebijakan luar negeri Yordania menghadapi berbagai kontradiksi. Sejak 26 Oktober 1994, Yordania terikat dalam perjanjian damai dengan Israel yang mencakup hubungan diplomatik, keamanan perbatasan, kerja sama ekonomi, dan pengelolaan sumber daya air, tetapi perjanjian tersebut tidak menghapus perbedaan mengenai pendudukan Palestina, permukiman Israel, status Yerusalem, dan masa depan negara Palestina (United Nations Peacemaker, 1994). Yordania juga memiliki kemitraan strategis dengan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi, pertahanan, keamanan, dan pembangunan. Memorandum kemitraan tahun 2022 bahkan menyediakan bantuan sekitar USD10,15 miliar untuk periode tujuh tahun (U.S. Department of State, 2022).

Ketergantungan terhadap dukungan eksternal tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi domestik Yordania yang menghadapi pengangguran, kelangkaan air, keterbatasan lapangan kerja, dan tekanan terhadap pelayanan publik. Perekonomian Yordania diperkirakan tumbuh sebesar 2,8% pada 2025, sedangkan tingkat pengangguran pada kuartal III 2025 mencapai 16,2% untuk seluruh penduduk dan 21,4% di kalangan warga negara Yordania (Department of Statistics, 2025; World Bank, n.d.). Konflik regional juga memengaruhi perdagangan, investasi, pariwisata, harga energi, dan persepsi risiko terhadap perekonomian negara tersebut.

Persoalan Palestina memiliki arti penting bagi politik luar negeri dan politik domestik Yordania karena hubungan historis, geografis, sosial, dan demografis kedua masyarakat. Yordania menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 2,39 juta pengungsi Palestina yang terdaftar pada UNRWA (UNRWA, n.d.). Kerajaan Hasyimiyah juga memiliki tanggung jawab sebagai penjaga situs-situs suci Islam dan Kristen di Yerusalem, yang menjadi sumber legitimasi politik sekaligus modal diplomatik dalam mempertahankan status quo dan mendukung pembentukan negara Palestina (Royal Hashemite Court, n.d.).

Konflik Gaza setelah 7 Oktober 2023 semakin memperbesar dilema Yordania. Di satu sisi, pemerintah harus menjaga hubungan keamanan dengan Amerika Serikat, mempertahankan stabilitas perbatasan, dan menghindari konfrontasi langsung dengan Israel. Di sisi lain, korban sipil, kehancuran Gaza, ketegangan di Yerusalem, serta ancaman pemindahan warga Palestina menimbulkan tekanan politik dan moral agar Yordania mengambil sikap lebih tegas. Pemindahan warga Palestina dipandang dapat mengubah struktur demografis, mengganggu stabilitas nasional, menghapus prospek negara Palestina, serta menjadikan Yordania sebagai alternatif penyelesaian konflik. Karena itu, Yordania secara konsisten menolaknya dan mendukung solusi dua negara (Royal Hashemite Court, 2023).

Kajian terdahulu umumnya menjelaskan kebijakan luar negeri Yordania melalui perspektif negara kecil, ketergantungan bantuan, diplomasi aktif, mediasi konflik, serta upaya mempertahankan stabilitas negara. Yordania dinilai mampu mengubah keterbatasan material menjadi pengaruh diplomatik melalui reputasi positif, dukungan terhadap perdamaian, dan keterlibatan dalam isu keamanan manusia (Ponížilová, 2013). Konsep niche diplomacy juga menunjukkan bahwa Yordania dapat mengubah kerentanan struktural menjadi modal diplomatik melalui mediasi regional, diplomasi air, dan tata kelola pengungsi (Chaziza & Lutmar, 2026). Namun, masih diperlukan penjelasan mengenai cara Yordania menyeimbangkan kepentingan keamanan, ekonomi, kemanusiaan, legitimasi domestik, dan hubungan strategis setelah 7 Oktober 2023.

Untuk menjelaskan kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan konsep diplomasi penyeimbang yang berkaitan dengan strategi hedging, yaitu kombinasi pendekatan kooperatif dan kompetitif dalam mencapai berbagai kepentingan nasional yang tidak selalu sejalan (Gonzalez-Pujol, 2024). Dalam praktiknya, Yordania mempertahankan kerja sama keamanan dan ekonomi dengan negara-negara Barat, tetapi tetap menolak kebijakan Israel di Palestina

serta menggunakan forum internasional, hubungan bilateral, kerja sama Arab, dan statusnya di Yerusalem untuk mendorong penghentian perang. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana Yordania menjalankan diplomasi penyeimbang untuk menjaga stabilitas nasional, mempertahankan hubungan strategis, dan memperjuangkan kepentingan Palestina. Penelitian ini berargumentasi bahwa kebijakan tersebut merupakan strategi penyeimbangan adaptif, bukan netralitas pasif, meskipun efektivitasnya dibatasi oleh ketergantungan ekonomi, ketimpangan kekuatan, tekanan domestik, dan ketidakpastian keamanan regional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis secara mendalam kebijakan diplomatik Pemerintah Kerajaan Hasyimiyah Yordania dalam merespons konflik Palestina–Israel setelah 7 Oktober 2023 (Yin, 2018, Chapter 1). Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan proses, pertimbangan, instrumen, serta keterbatasan diplomasi Yordania dalam konteks politik, keamanan, ekonomi, dan sosial. Unit analisis meliputi pidato dan pernyataan resmi, hubungan bilateral, pertemuan tingkat tinggi, aktivitas dalam forum multilateral, diplomasi kemanusiaan, serta tindakan politik terkait Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem. Periode penelitian dibatasi sejak 7 Oktober 2023 hingga 31 Desember 2025, dengan penggunaan sejumlah dokumen sebelum periode tersebut untuk menjelaskan landasan historis dan institusional kebijakan luar negeri Yordania. Data primer bersumber dari dokumen resmi Pemerintah Yordania, pidato Raja Abdullah II, pernyataan Kementerian Luar Negeri, dokumen konferensi internasional, perjanjian Yordania–Israel, laporan PBB dan UNRWA, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan analisis kebijakan yang relevan.

Dokumen penelitian dipilih melalui purposive sampling berdasarkan relevansinya dengan isu gencatan senjata, pemindahan paksa warga Palestina, solusi dua negara, hubungan Yordania dengan mitra strategis, situs suci di Yerusalem, bantuan kemanusiaan, tindakan diplomatik, serta stabilitas nasional Yordania. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis isi kualitatif melalui proses pengumpulan, klasifikasi, pengodean, dan interpretasi dokumen (Krippendorff, 2019, Chapter 2). Pengodean dilakukan berdasarkan dimensi pemeliharaan kerja sama strategis, penolakan diplomatik, diversifikasi hubungan, diplomasi normatif dan kemanusiaan, tekanan domestik, serta keterbatasan efektivitas. Analisis juga membedakan diplomasi deklaratif berupa pidato dan pernyataan politik dengan diplomasi operasional berupa tindakan nyata, kemudian menilai tujuan kebijakan berdasarkan kepentingan stabilitas nasional, keamanan, ekonomi, legitimasi domestik, hak rakyat Palestina, dan kedudukan Yordania di Yerusalem. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, perbandingan pernyataan pada berbagai forum, serta pemeriksaan konsistensi antardokumen dan perkembangan waktu. Keterbatasan penelitian meliputi dominasi dokumen resmi, tidak adanya wawancara langsung dengan pembuat kebijakan, serta perkembangan konflik yang terus berlangsung setelah periode penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fondasi Diplomasi Yordania sebelum 7 Oktober 2023

Diplomasi Yordania setelah 7 Oktober 2023 tidak terbentuk dalam ruang kosong. Strategi tersebut dibangun di atas empat fondasi utama, yaitu hubungan damai yang kompleks dengan Israel, kemitraan strategis dengan Amerika Serikat, keterikatan historis dengan persoalan Palestina, dan kebutuhan mempertahankan stabilitas domestik.

1. Hubungan Damai yang Tidak Sepenuhnya Normal

Perjanjian Damai Yordania–Israel pada 26 Oktober 1994 mengakhiri kondisi perang formal dan mengatur hubungan diplomatik, keamanan perbatasan, kerja sama ekonomi, pembagian sumber daya air, serta pengakuan terhadap peran khusus Yordania atas situs-situs

suci Islam di Yerusalem (Treaty of Peace Between the State of Israel and the Hashemite Kingdom of Jordan, 1994, arts. 2–7, 11, 29). Perjanjian tersebut memberikan keuntungan strategis berupa stabilitas perbatasan dan penguatan posisi Yordania sebagai mitra perdamaian negara-negara Barat. Namun, pendudukan wilayah Palestina, perluasan permukiman, operasi militer Israel, dan ketegangan di Masjid Al-Aqsa menyebabkan hubungan kedua negara tidak memperoleh dukungan sosial yang kuat. Oleh karena itu, hubungan Yordania–Israel dapat dipahami sebagai “perdamaian dingin”, yaitu hubungan yang dipertahankan demi kebutuhan keamanan, tetapi tetap disertai penolakan terbuka terhadap kebijakan Israel yang dianggap merugikan Palestina, Yerusalem, dan stabilitas kawasan.

2. Kemitraan Strategis dengan Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan mitra utama Yordania dalam bidang keamanan, pertahanan, pembangunan, dan stabilitas ekonomi, terutama untuk menghadapi ancaman perbatasan, terorisme, penyelundupan, pengungsi, dan dampak konflik regional. Sebaliknya, Amerika Serikat memandang Yordania sebagai negara yang stabil, memiliki hubungan dengan Israel dan Palestina, serta menempati posisi strategis di dekat Irak dan Suriah. Meskipun demikian, dukungan Amerika Serikat terhadap Israel sering kali bertentangan dengan kepentingan Yordania mengenai Palestina dan Yerusalem. Karena tidak dapat menjauh dari Washington maupun menerima seluruh kebijakannya, Yordania menerapkan diferensiasi kebijakan dengan tetap mempertahankan kemitraan strategis sambil menggunakan kedekatan tersebut untuk mendorong penghentian perang, perlindungan warga sipil, penyaluran bantuan kemanusiaan, dan penerapan solusi dua negara.

3. Palestina sebagai Kepentingan Luar Negeri dan Domestik

Persoalan Palestina merupakan bagian penting dari kebijakan luar negeri sekaligus dinamika domestik Yordania karena berkaitan dengan sejarah negara, struktur masyarakat, hubungan keluarga lintas batas, pengungsi, perdagangan, keamanan, dan legitimasi politik. Lebih dari 2,39 juta pengungsi Palestina tercatat berada di Yordania, sehingga setiap eskalasi konflik di Palestina dapat memicu demonstrasi, sentimen anti-Israel, kritik terhadap negara-negara Barat, tuntutan pembatalan perjanjian damai, dan kekhawatiran terhadap gelombang pengungsi baru. Pemerintah Yordania harus menunjukkan keberpihakan terhadap Palestina untuk mempertahankan legitimasi masyarakat, tetapi juga perlu mengendalikan mobilisasi publik agar tidak mengganggu keamanan nasional. Dukungan terhadap solusi dua negara karena itu tidak hanya didasarkan pada solidaritas dan hak rakyat Palestina, tetapi juga menjadi strategi untuk mencegah penyelesaian konflik yang dapat mengorbankan kepentingan dan stabilitas Yordania.

4. Penjagaan Situs Suci Yerusalem sebagai Modal Diplomatik

Penjagaan Hasyimiyah terhadap situs-situs suci Islam dan Kristen di Yerusalem menjadi fondasi penting diplomasi Yordania sekaligus mandat historis yang mencakup pemeliharaan situs, perlindungan status quo, dan penolakan terhadap perubahan identitas keagamaan maupun hukum Yerusalem. Kedudukan ini memberikan Yordania modal diplomatik yang berbeda dari negara-negara Arab lainnya karena kerajaan memiliki peran langsung dalam persoalan Masjid Al-Aqsa dan situs suci lain, bukan sekadar menyatakan dukungan umum kepada Palestina. Penjagaan tersebut juga memperkuat legitimasi domestik Kerajaan Hasyimiyah dan memberikan dasar bagi keterlibatan aktif Yordania dalam diplomasi internasional mengenai Yerusalem. Bersama hubungan dengan Israel, kemitraan dengan Amerika Serikat, dan keterikatan terhadap Palestina, peran ini membentuk karakter kebijakan luar negeri Yordania yang telah bersifat menyeimbangkan bahkan sebelum konflik 7 Oktober 2023.

Perang Gaza sebagai Ujian terhadap Diplomasi Yordania

Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan operasi militer Israel di Gaza setelahnya mengubah lingkungan strategis Yordania. Konflik tersebut bukan hanya menciptakan krisis

kemanusiaan, tetapi juga menimbulkan risiko perluasan perang, perpindahan penduduk, ketegangan di Tepi Barat dan Yerusalem, serta tekanan domestik terhadap Pemerintah Yordania. Respons awal Yordania memperlihatkan dua tujuan yang dijalankan secara bersamaan. Pertama, mencegah perang meluas dan mengancam stabilitas kawasan. Kedua, mengubah fokus diplomasi internasional dari pembalasan militer menuju perlindungan warga sipil, penghentian perang, dan penyelesaian politik. Dalam komunikasi dengan Presiden Amerika Serikat pada 31 Oktober 2023, Raja Abdullah II mendesak terciptanya gencatan kemanusiaan segera (Royal Hashemite Court, 2023), kelancaran pengiriman bantuan, penghentian perang, dan pembentukan cakrawala politik. Sikap ini memperlihatkan bahwa Yordania tidak memutuskan komunikasi dengan Washington, tetapi menggunakan hubungan tersebut untuk menyampaikan posisi yang berbeda mengenai cara menangani konflik.

1. Penolakan terhadap Pemindahan Warga Palestina

Penolakan terhadap pemindahan warga Palestina menjadi salah satu prinsip paling konsisten dalam diplomasi Yordania setelah 7 Oktober 2023. Dalam Konferensi Perdamaian Kairo pada 21 Oktober 2023, Raja Abdullah II menegaskan penolakan terhadap pemindahan paksa maupun pemindahan internal warga Palestina berdasarkan hukum internasional dan perlindungan hak-hak mereka (Royal Hashemite Court, 2023). Yordania memandang pemindahan tersebut dapat menghilangkan hak warga Palestina atas tanahnya, melemahkan prospek pembentukan negara Palestina, menimbulkan tekanan demografis, ekonomi, dan keamanan bagi Yordania, serta menghidupkan kembali gagasan Yordania sebagai tanah air alternatif. Oleh karena itu, sikap ini tidak hanya mencerminkan solidaritas kemanusiaan, tetapi juga menjadi bagian dari perlindungan kepentingan dan keamanan nasional Yordania.

2. Dari Kecaman menuju Tindakan Diplomatik

Meningkatnya korban dan kehancuran di Gaza mendorong Yordania mengubah responsnya dari kecaman dan seruan diplomatik menjadi tindakan yang lebih tegas. Pada 1 November 2023, Yordania memanggil pulang duta besarnya dari Tel Aviv dan menyatakan bahwa duta besar Israel tidak dapat kembali ke Amman selama perang serta krisis kemanusiaan di Gaza masih berlangsung (Ministry of Foreign Affairs and Expatriates, 2023). Meskipun demikian, Yordania tidak membatalkan Perjanjian Damai 1994 atau memutuskan seluruh hubungan dengan Israel. Penarikan duta besar digunakan untuk menunjukkan penolakan politik dan merespons tekanan domestik, sementara kerangka perjanjian tetap dipertahankan guna menjaga komunikasi, koordinasi perbatasan, dan pengelolaan kepentingan praktis. Langkah tersebut mencerminkan diplomasi penyeimbang yang meningkatkan tekanan terhadap Israel tanpa bergerak menuju konfrontasi penuh.

3. Mempertahankan Jalur Politik Solusi Dua Negara

Yordania secara konsisten berupaya mengembalikan solusi dua negara ke dalam agenda diplomatik karena menilai penghentian perang tanpa penyelesaian politik hanya akan menunda konflik berikutnya. Dukungan terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2735 pada Juni 2024 disertai penegasan mengenai pentingnya gencatan senjata menyeluruh, bantuan kemanusiaan berkelanjutan, penolakan terhadap perubahan geografis dan demografis Gaza, penarikan pasukan Israel, rekonstruksi, serta pembentukan negara Palestina berdasarkan garis 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota (Ministry of Foreign Affairs and Expatriates, 2024; United Nations Security Council, 2024). Yordania juga berkoordinasi dengan negara-negara Arab dan Islam untuk mendukung mediasi dan membentuk jalur politik yang terikat waktu. Namun, meskipun mampu membangun koalisi dan mempertahankan isu Palestina dalam forum internasional, Yordania tidak memiliki kekuatan material untuk memaksakan implementasi solusi tersebut.

4. Menjaga Konflik agar Tidak Masuk ke Wilayah Yordania

Perluasan ketegangan regional setelah perang Gaza meningkatkan risiko wilayah udara dan perbatasan Yordania terdampak pertukaran serangan antara Israel, Iran, serta kelompok

bersenjata di Irak, Suriah, Lebanon, dan Laut Merah. Karena itu, Yordania menegaskan bahwa negaranya tidak akan menjadi medan pertempuran bagi konflik pihak lain (Royal Hashemite Court, 2024). Sikap tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap Palestina dibedakan dari keterlibatan langsung dalam konfrontasi militer regional. Yordania menolak perang di Gaza, tetapi juga menolak penggunaan wilayahnya oleh pihak mana pun yang dapat mengancam kedaulatan dan stabilitas nasional. Kebijakan ini menimbulkan dilema domestik karena tindakan perlindungan wilayah dapat dipersepsikan sebagai bantuan tidak langsung kepada Israel, sehingga pemerintah harus menjelaskan bahwa perlindungan kedaulatan negara dapat berjalan bersamaan dengan penolakan terhadap perang dan dukungan terhadap Palestina.

Diplomasi Kemanusiaan sebagai Instrumen Politik Luar Negeri

Salah satu karakter paling menonjol dari respons Yordania terhadap perang Gaza adalah penggabungan antara diplomasi politik dan tindakan kemanusiaan. Pemerintah Yordania tidak hanya menyampaikan kecaman, menyerukan gencatan senjata, atau melakukan konsultasi dengan negara lain, tetapi juga menggunakan institusi militer, badan amal, rumah sakit lapangan, jalur logistik, dan forum internasional untuk menyalurkan bantuan kepada penduduk Gaza. Diplomasi kemanusiaan tersebut penting karena kemampuan Yordania untuk memengaruhi keputusan militer Israel sangat terbatas. Yordania tidak memiliki kapasitas politik atau militer untuk menghentikan perang secara sepihak. Dalam kondisi tersebut, pemberian bantuan menjadi instrumen yang memungkinkan pemerintah menunjukkan keberpihakan konkret kepada warga Palestina sekaligus mempertahankan relevansi Yordania dalam pengelolaan krisis internasional.

1. Rumah Sakit Lapangan, Konvoi Darat, dan Penerjunan Bantuan

Yordania menjalankan diplomasi kemanusiaan melalui pengoperasian rumah sakit lapangan di Gaza dan Khan Yunis, distribusi makanan dan bantuan medis, pengiriman konvoi darat, serta penerjunan bantuan dari udara. Pada 31 Mei 2024, Angkatan Bersenjata Yordania telah melaksanakan penerjunan bantuan ke-100 dan mengoordinasikan sejumlah operasi bersama negara-negara mitra (Jordan Armed Forces–Arab Army, 2024). Selain menjangkau wilayah yang sulit diakses, operasi bersama tersebut digunakan untuk membangun koalisi kemanusiaan dan mendorong keterlibatan internasional. Jalur darat juga menjadi bagian penting, seperti pengiriman sekitar 356 ton bantuan melalui 24 truk dari Yordania pada 28 Februari 2024 (OCHA, 2024). Dengan demikian, Yordania tidak hanya berperan sebagai donor, tetapi juga sebagai pusat pengumpulan, pemeriksaan, koordinasi, dan pengiriman bantuan dengan memanfaatkan posisi geografisnya sebagai modal diplomatik.

2. Konferensi Internasional sebagai Upaya Mengubah Bantuan Menjadi Agenda Politik

Pada 11 Juni 2024, Yordania bersama Mesir dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan Konferensi Call for Action: Urgent Humanitarian Response for Gaza di kawasan Laut Mati untuk membahas peningkatan bantuan, perlindungan warga sipil, hambatan distribusi, kebutuhan logistik, serta pemulihan awal Gaza (Ministry of Foreign Affairs and Expatriates, 2024). Konferensi tersebut menunjukkan bahwa bantuan kemanusiaan tidak diposisikan sebagai kegiatan karitatif semata, melainkan sebagai pintu masuk untuk mendorong gencatan senjata, kepatuhan terhadap hukum internasional, dan penyelesaian politik. Melalui peran sebagai penghubung antara negara donor, organisasi internasional, negara-negara Arab, dan pihak yang mengendalikan akses ke Gaza, Yordania menerapkan diplomasi ceruk untuk meningkatkan nilai strategisnya sekaligus memasukkan kepentingan politiknya ke dalam agenda internasional.

3. Dukungan terhadap UNRWA

Yordania secara konsisten mendukung UNRWA karena keberlangsungan lembaga tersebut berkaitan dengan kepentingan domestik, perlindungan hak pengungsi Palestina, dan penyaluran bantuan ke Gaza. Pada 2024, Yordania bersama Kuwait dan Slovenia memprakarsai pernyataan komitmen bersama untuk mendukung UNRWA serta menyelenggarakan pertemuan

tingkat menteri bersama Swedia guna menggalang dukungan politik dan pendanaan (UNRWA, 2024). Dukungan tersebut penting karena UNRWA menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial bagi pengungsi Palestina di Yordania, mempertahankan pengakuan internasional terhadap status serta hak mereka, dan menjadi salah satu lembaga utama dalam distribusi bantuan di Gaza. Pelemahan UNRWA berpotensi memindahkan beban pelayanan kepada Yordania sekaligus mengurangi peluang penyelesaian politik yang adil bagi pengungsi Palestina.

4. Arti Politik Diplomasi Kemanusiaan

Diplomasi kemanusiaan Yordania memiliki fungsi politik untuk memperkuat legitimasi domestik, menunjukkan keberpihakan nyata terhadap Palestina, mempertahankan posisi regional, dan mengompensasi keterbatasan kekuatan militer maupun politik. Melalui rumah sakit lapangan, jalur bantuan, konferensi internasional, mobilisasi donor, dan dukungan terhadap UNRWA, Yordania tetap relevan dalam pengelolaan konflik yang berdampak langsung terhadap keamanan nasionalnya. Namun, strategi ini memiliki keterbatasan karena penerjunan bantuan hanya dapat membawa volume kecil dan tidak mampu menggantikan jalur darat yang aman serta berkelanjutan (WFP, 2024). Efektivitas bantuan juga bergantung pada kondisi pertempuran, keamanan konvoi, pembukaan perbatasan, persetujuan akses, dan kebijakan Israel. Oleh karena itu, diplomasi kemanusiaan dapat mengurangi penderitaan dan memperkuat tekanan internasional, tetapi tidak dapat menyelesaikan akar politik konflik Gaza.

Hubungan Yordania–Amerika Serikat: Aliansi tanpa Kepatuhan Penuh

Hubungan Yordania dengan Amerika Serikat menjadi ujian penting bagi diplomasi penyeimbang setelah 7 Oktober 2023. Amerika Serikat merupakan mitra keamanan dan ekonomi utama Yordania, tetapi juga menjadi pendukung strategis utama Israel. Perbedaan posisi mengenai perang Gaza menempatkan Amman dalam keadaan sulit: Yordania membutuhkan Washington, tetapi tidak dapat menerima kebijakannya terhadap Israel tanpa syarat.

1. Arti Strategis Bantuan Amerika Serikat

Pada September 2022, Yordania dan Amerika Serikat menandatangani memorandum kesepahaman bantuan untuk tahun fiskal 2023–2029. Kesepakatan tersebut mencakup komitmen politik Amerika Serikat untuk mengupayakan bantuan ekonomi dan militer rata-rata sedikitnya 1,45 miliar dolar AS setiap tahun, atau sekitar 10,15 miliar dolar AS selama tujuh tahun, dengan tetap bergantung pada persetujuan Kongres (Ministry of Planning and International Cooperation, 2022).

Bantuan tersebut penting bagi kemampuan Yordania membiayai kebutuhan pertahanan, menjaga keamanan perbatasan, melaksanakan reformasi ekonomi, menyediakan pelayanan publik, dan menangani dampak keberadaan pengungsi. Hubungan keamanan bilateral juga mencakup latihan militer, kerja sama pemberantasan terorisme, keamanan perbatasan, transfer pertahanan, dan pengaturan penggunaan fasilitas tertentu oleh pasukan Amerika Serikat. Besarnya hubungan tersebut membuat peralihan strategis Yordania menjauh dari Amerika Serikat sulit dilakukan. Tidak terdapat mitra lain yang dapat segera menggantikan keseluruhan dukungan ekonomi, pertahanan, dan diplomatik Washington. Oleh sebab itu, Yordania memilih mempertahankan aliansi sambil memperjuangkan perbedaan kebijakan dari dalam hubungan tersebut.

2. Penggunaan Akses Politik untuk Memengaruhi Washington

Setelah pecahnya perang, Raja Abdullah II dan pejabat Yordania melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah Amerika Serikat. Agenda yang disampaikan secara konsisten mencakup penghentian perang, perlindungan warga sipil, peningkatan bantuan, penolakan pemindahan penduduk, pencegahan perluasan konflik, dan pembentukan jalur politik menuju solusi dua negara. Dalam hubungan ini, akses Yordania terhadap Gedung Putih, Departemen Luar Negeri, Kongres, dan lembaga keamanan Amerika Serikat merupakan modal

diplomatik. Yordania dapat menyampaikan secara langsung bahwa kelanjutan perang bukan hanya menimbulkan penderitaan di Gaza, tetapi juga mengancam stabilitas sekutu-sekutu Amerika Serikat di kawasan.

Argumen tersebut memperluas persoalan Gaza dari isu Palestina–Israel menjadi isu keamanan regional. Pemerintah Yordania berupaya meyakinkan Washington bahwa pemindahan penduduk, eskalasi di Tepi Barat, ketegangan di Yerusalem, dan perluasan perang dapat mengguncang negara-negara yang selama ini mendukung kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah. Namun, akses tidak selalu menghasilkan perubahan kebijakan yang sesuai dengan keinginan Yordania. Amerika Serikat tetap mempertahankan dukungan keamanan yang kuat terhadap Israel. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kedekatan diplomatik memberikan kesempatan untuk memengaruhi, tetapi tidak menjamin kemampuan menentukan keputusan negara besar.

3. Diferensiasi Posisi dalam Kerangka Kemitraan

Diplomasi Yordania memperlihatkan bahwa aliansi tidak identik dengan kesamaan sikap dalam seluruh persoalan. Yordania tidak memutuskan kemitraannya dengan Amerika Serikat, tetapi secara terbuka menolak pendekatan yang dinilai memberikan ruang bagi kelanjutan perang atau pemindahan warga Palestina. Diferensiasi tersebut dilakukan dengan menghindari serangan langsung terhadap hubungan bilateral. Kritik Yordania umumnya diarahkan kepada kebijakan, operasi militer, ketidakpatuhan terhadap hukum internasional, atau ketidakmampuan masyarakat internasional menghentikan perang. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah mempertahankan komunikasi dengan Washington tanpa kehilangan ruang untuk menyampaikan penolakan.

Pola tersebut juga terlihat pada 2025. Ketika muncul kembali gagasan pemindahan penduduk Gaza, Yordania menegaskan penolakan terhadap pengusiran, pemukiman kembali, dan gagasan tanah air alternatif. Pada saat yang sama, pemerintah tetap menyatakan bahwa Yordania dan Amerika Serikat merupakan mitra dalam upaya mencapai perdamaian. Sikap tersebut memperlihatkan esensi diplomasi penyeimbang: mempertahankan hubungan strategis, tetapi menetapkan batas terhadap kebijakan yang dapat diterima. Penolakan terhadap pemindahan menjadi garis merah karena berkaitan langsung dengan hak Palestina dan keamanan nasional Yordania.

4. Ketergantungan dan Otonomi Terbatas

Hubungan Yordania–Amerika Serikat memperlihatkan adanya ketergantungan yang tidak sepenuhnya menghapus otonomi. Bantuan ekonomi dan militer membatasi pilihan Yordania, tetapi arti strategis Yordania bagi Amerika Serikat juga memberikan ruang tawar tertentu. Washington berkepentingan mempertahankan Yordania sebagai negara stabil, mitra keamanan, penjaga perbatasan, penghubung dengan Palestina, dan pendukung penyelesaian diplomatik. Konflik di Gaza, Tepi Barat, Suriah, Irak, dan Lebanon justru meningkatkan arti strategis Yordania bagi kebijakan Amerika Serikat. Hubungan tersebut karena itu bersifat saling membutuhkan, tetapi tidak seimbang. Yordania mempunyai kapasitas untuk menyampaikan perbedaan, memperingatkan konsekuensi, dan memengaruhi sebagian agenda. Namun, kemampuan tersebut tidak cukup untuk mengubah secara mendasar dukungan strategis Amerika Serikat kepada Israel.

Pengelolaan Hubungan dengan Israel: Antara Perjanjian dan Tekanan

Hubungan Yordania dengan Israel setelah 7 Oktober 2023 ditandai oleh meningkatnya ketegangan politik tanpa pembatalan kerangka perdamaian. Yordania mengurangi tingkat hubungan diplomatik, memperkeras pernyataan politik, dan menolak kebijakan Israel, tetapi tetap mempertahankan Perjanjian Damai 1994.

1. Penarikan Duta Besar sebagai Sanksi Diplomatik Terbatas

Pada 1 November 2023, Yordania memanggil pulang duta besarnya dari Israel. Kementerian Luar Negeri juga menyampaikan bahwa duta besar Israel yang sebelumnya telah

meninggalkan Yordania tidak diizinkan kembali selama perang dan krisis kemanusiaan di Gaza masih berlangsung. Langkah tersebut merupakan bentuk sanksi diplomatik yang signifikan, tetapi terbatas. Penarikan duta besar menunjukkan penurunan hubungan politik dan penolakan terhadap perang. Namun, tindakan tersebut belum mencapai pemutusan hubungan diplomatik atau pembatalan perjanjian damai. Pilihan tersebut memungkinkan pemerintah memenuhi sebagian tuntutan publik tanpa menghilangkan seluruh jalur komunikasi dengan Israel. Dalam situasi konflik, saluran komunikasi tetap dibutuhkan untuk membahas keamanan perbatasan, akses bantuan, warga negara, situs suci, dan risiko eskalasi. Penarikan duta besar karena itu memperlihatkan perbedaan antara penghukuman diplomatik dan pemutusan strategis. Yordania berupaya meningkatkan biaya politik bagi Israel, tetapi menghindari tindakan yang dapat menghasilkan konsekuensi keamanan serta ekonomi yang sulit dikendalikan.

2. Perjanjian Damai sebagai Instrumen Pengelolaan Konflik

Perjanjian Damai 1994 sering dipandang sebagai simbol normalisasi yang ditolak oleh sebagian masyarakat Yordania. Namun, dari perspektif pemerintah, perjanjian tersebut juga berfungsi sebagai instrumen pengelolaan konflik. Perjanjian memberikan dasar hukum bagi pengaturan perbatasan, air, keamanan, komunikasi, dan penyelesaian sengketa. Membatalkan perjanjian tidak dengan sendirinya menghentikan perang di Gaza. Sebaliknya, pembatalan dapat meningkatkan ketidakpastian di sepanjang perbatasan, menghilangkan kanal komunikasi, dan mengurangi kemampuan Yordania menyampaikan protes secara langsung kepada Israel. Karena itu, pemerintah memilih mempertahankan perjanjian sambil menurunkan kualitas hubungan politik. Sikap tersebut sering menimbulkan kritik karena dianggap tidak sebanding dengan skala kehancuran di Gaza. Namun, bagi pemerintah, perjanjian diperlakukan sebagai mekanisme perlindungan kepentingan nasional dan bukan sebagai bentuk persetujuan terhadap seluruh kebijakan Israel.

3. Yerusalem dan Tepi Barat sebagai Garis Pertahanan Strategis

Selain Gaza, perhatian utama Yordania diarahkan pada Tepi Barat dan Yerusalem. Pemerintah Yordania menilai bahwa perluasan permukiman, aneksasi, kekerasan pemukim, perubahan status quo Masjid Al-Aqsa, dan pelemahan Otoritas Palestina dapat menghasilkan konsekuensi langsung bagi Yordania. Berbeda dengan Gaza yang tidak berbatasan langsung dengan Yordania, Tepi Barat berada di sepanjang perbatasan barat Kerajaan. Eskalasi di wilayah tersebut dapat meningkatkan perpindahan penduduk, kekerasan lintas batas, penyelundupan senjata, mobilisasi masyarakat, dan tekanan terhadap hubungan Yordania–Israel. Yerusalem juga berkaitan langsung dengan kedudukan Penjagaan Hasyimiyah. Setiap tindakan yang dinilai mengubah status historis dan hukum Masjid Al-Aqsa tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak Palestina, tetapi juga sebagai tantangan terhadap peran resmi Yordania. Dengan demikian, diplomasi Yordania terhadap Tepi Barat dan Yerusalem memiliki karakter defensif. Tujuannya bukan hanya membantu Palestina, tetapi juga mencegah perubahan permanen yang dapat memindahkan pusat konflik dan konsekuensinya menuju Yordania. Pada 2025, pemerintah Yordania tetap mempertahankan penolakan terhadap perluasan permukiman, perubahan demografis, dan pemindahan penduduk dari Gaza maupun Tepi Barat (Ministry of Foreign Affairs and Expatriates [MFA], 2025). Konsistensi tersebut menunjukkan bahwa penolakan pemindahan bukan respons sementara terhadap fase awal perang, melainkan komponen jangka panjang dari kebijakan keamanan nasional Yordania.

4. Ketegangan antara Efektivitas dan Simbolisme

Tindakan Yordania terhadap Israel menghadapi persoalan efektivitas. Penarikan duta besar, kecaman, dan mobilisasi internasional memiliki makna politik, tetapi belum mampu memaksa Israel menghentikan operasi militer atau mengubah kebijakannya terhadap wilayah Palestina. Keterbatasan tersebut mencerminkan ketimpangan kekuatan. Israel memiliki keunggulan militer, hubungan khusus dengan Amerika Serikat, dan kemampuan bertindak secara sepihak. Yordania mempunyai legitimasi, akses diplomatik, dan posisi geografis, tetapi

tidak mempunyai instrumen paksaan yang sebanding. Akibatnya, sebagian tindakan Yordania memiliki unsur simbolis yang kuat. Namun, simbolisme tidak selalu berarti bahwa kebijakan tersebut tidak memiliki nilai. Dalam diplomasi negara kecil, tindakan simbolis dapat digunakan untuk membangun norma, mempertahankan legitimasi, mengoordinasikan tekanan internasional, dan menandai batas politik yang tidak dapat diterima. Persoalan utamanya adalah ketika jarak antara pernyataan dan hasil menjadi terlalu besar. Apabila Yordania terus mengeluarkan kecaman tanpa adanya perubahan di lapangan, kredibilitas diplomasi dapat menurun. Pemerintah karena itu berupaya menggabungkan pernyataan dengan tindakan, seperti penarikan duta besar, bantuan, konferensi, dukungan terhadap resolusi internasional, dan kerja sama dengan koalisi Arab-Islam.

Diplomasi Penyeimbang Yordania sebagai Strategi Adaptif

Berdasarkan pembahasan tersebut, diplomasi Yordania pasca-7 Oktober 2023 dapat digambarkan sebagai strategi adaptif yang beroperasi melalui kombinasi kerja sama, diferensiasi, pembatasan, dan mobilisasi internasional. Pada dimensi pertama, Yordania mempertahankan kemitraan strategis dengan Amerika Serikat. Hubungan tersebut menyediakan dukungan ekonomi, militer, dan diplomatik yang diperlukan untuk stabilitas negara. Namun, Yordania tidak sepenuhnya mengikuti kebijakan Amerika Serikat mengenai Israel. Pada dimensi kedua, Yordania mempertahankan Perjanjian Damai dengan Israel, tetapi menurunkan hubungan diplomatik dan meningkatkan kritik terhadap operasi militer, pemindahan penduduk, permukiman, serta tindakan di Yerusalem. Kerja sama praktis dipisahkan dari persetujuan politik.

Pada dimensi ketiga, Yordania memperkuat hubungan dengan negara-negara Arab, Islam, Eropa, dan organisasi internasional. Diversifikasi tersebut meningkatkan kemampuan Amman membangun dukungan tanpa bergantung hanya pada satu jalur diplomatik. Pada dimensi keempat, Yordania menggunakan bantuan kemanusiaan, rumah sakit lapangan, koridor bantuan, dukungan terhadap UNRWA, dan konferensi internasional untuk mengompensasi keterbatasan kekuatan material. Diplomasi kemanusiaan menjadi sumber legitimasi sekaligus instrumen pengaruh. Strategi tersebut memperlihatkan bahwa Yordania tidak bersikap netral. Pemerintah secara jelas mendukung hak rakyat Palestina, menolak pemindahan penduduk, mempertahankan solusi dua negara, dan mengecam kebijakan Israel. Akan tetapi, keberpihakan normatif tersebut tidak diterjemahkan menjadi pemutusan total hubungan dengan Amerika Serikat atau Israel.

Kebijakan ini juga tidak dapat dikategorikan sebagai *bandwagoning* kepada Amerika Serikat karena Yordania berulang kali mengambil posisi yang berbeda dan menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang didukung Washington. Pada saat yang sama, kebijakan tersebut bukan *balancing* militer terhadap Israel karena Yordania tidak membangun koalisi untuk menghadapi Israel melalui kekuatan bersenjata. Istilah diplomasi penyeimbang karena itu lebih tepat digunakan. Penyeimbangan terjadi pada tingkat kepentingan, instrumen, hubungan, dan legitimasi, bukan pada keseimbangan kekuatan militer. Yordania mempertahankan kemitraan yang diperlukan, tetapi membatasi konsekuensi politiknya; mendukung Palestina, tetapi menghindari perang langsung; menekan Israel, tetapi menjaga mekanisme hubungan; serta memberikan bantuan sambil terus menuntut penyelesaian politik.

Efektivitas strategi tersebut dapat dinilai pada dua tingkat. Pada tingkat perlindungan negara, diplomasi penyeimbang relatif berhasil mempertahankan stabilitas Yordania, menjaga dukungan eksternal, dan mencegah keterlibatan langsung dalam perang. Pada tingkat penyelesaian konflik Palestina-Israel, hasilnya jauh lebih terbatas karena Yordania tidak mampu menghentikan perang atau memaksakan pelaksanaan solusi dua negara. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama strategi Yordania bukan memenangkan konflik, melainkan mencegah agar konflik tidak menghancurkan kepentingan nasional Yordania sambil mempertahankan dukungan terhadap Palestina. Diplomasi Yordania dengan demikian

merupakan strategi untuk bertahan, mempertahankan relevansi, dan membatasi kerugian di tengah struktur kekuatan regional yang tidak seimbang.

Tekanan Politik Domestik dan Legitimasi Diplomasi

Diplomasi penyeimbang Yordania tidak hanya ditentukan oleh hubungan dengan Israel, Amerika Serikat, dan negara-negara Arab. Strategi tersebut juga dibentuk oleh kebutuhan pemerintah mempertahankan legitimasi di hadapan masyarakat domestik. Dalam konteks ini, perang Gaza menjadi persoalan politik dalam negeri karena hubungan historis, sosial, geografis, dan emosional antara masyarakat Yordania dan Palestina.

Solidaritas terhadap Palestina tidak terbatas pada penduduk Yordania keturunan Palestina. Perang Gaza mendorong mobilisasi berbagai kelompok masyarakat, termasuk organisasi politik, kelompok Islam, aktivis, organisasi profesi, mahasiswa, dan warga yang tidak memiliki keterlibatan langsung dengan partai politik. Karena itu, persoalan Palestina dapat berfungsi sebagai isu pemersatu masyarakat, meskipun setiap kelompok memiliki pandangan yang berbeda mengenai bentuk tindakan yang seharusnya diambil oleh pemerintah.

Curtis R. Ryan menunjukkan bahwa dampak perang Gaza terhadap politik domestik Yordania melampaui pembagian tradisional antara warga keturunan Palestina dan kelompok Transyordania. Perhatian terhadap Gaza berkembang menjadi persoalan nasional yang memengaruhi hubungan masyarakat dengan pemerintah, sikap terhadap Amerika Serikat, pandangan mengenai perjanjian damai dengan Israel, dan penilaian terhadap efektivitas diplomasi Yordania (Ryan, 2024).

1. Demonstrasi sebagai Tekanan terhadap Kebijakan Luar Negeri

Sejak Oktober 2023, demonstrasi solidaritas terhadap Palestina berlangsung di Amman dan sejumlah wilayah lain. Tuntutan yang disampaikan tidak hanya mencakup penghentian perang dan pembukaan akses bantuan, tetapi juga penutupan Kedutaan Besar Israel, penghentian kerja sama ekonomi, dan pembatalan Perjanjian Damai Yordania–Israel 1994. Pada akhir Maret 2024, ribuan demonstran berkumpul selama beberapa hari berturut-turut di sekitar Kedutaan Besar Israel di Amman. Demonstran menuntut penutupan kedutaan dan penghentian perjanjian damai. Pemerintah mengizinkan penyampaian solidaritas, tetapi aparat keamanan tetap membatasi pergerakan menuju gedung kedutaan dan wilayah perbatasan dengan Tepi Barat (Reuters, 2024). Perkembangan tersebut memperlihatkan dua tekanan yang harus dikelola secara bersamaan. Di satu sisi, pembatasan yang terlalu keras terhadap solidaritas Palestina dapat mengurangi legitimasi pemerintah dan menimbulkan kesan bahwa negara lebih melindungi hubungannya dengan Israel daripada aspirasi masyarakat. Di sisi lain, mobilisasi yang tidak dikendalikan dapat berkembang menjadi bentrokan, serangan terhadap fasilitas diplomatik, atau pergerakan massa menuju wilayah perbatasan. Pemerintah Yordania kemudian mengambil pendekatan ganda. Negara memberikan ruang bagi demonstrasi dan kegiatan solidaritas dalam batas tertentu, tetapi melarang tindakan yang dianggap mengancam keamanan, ketertiban umum, fasilitas diplomatik, dan wilayah perbatasan. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan protes merupakan bagian dari diplomasi penyeimbang, bukan persoalan keamanan domestik yang sepenuhnya terpisah.

2. Tekanan Masyarakat sebagai Modal Diplomatik

Tekanan domestik tidak selalu memperlemah posisi diplomatik pemerintah. Dalam kerangka *two-level games*, pemerintah dapat menggunakan kuatnya opini publik sebagai dasar ketika bernegosiasi dengan mitra internasional. Pemerintah Yordania dapat menyampaikan kepada Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara Barat bahwa kelanjutan perang, perluasan permukiman, atau pemindahan warga Palestina berpotensi mengganggu stabilitas salah satu mitra utama mereka di kawasan. Dengan demikian, tuntutan masyarakat memberikan dasar bagi pemerintah untuk mengambil posisi lebih tegas tanpa harus meninggalkan kemitraan strategis. Penarikan duta besar, kecaman terhadap operasi militer Israel, dukungan terhadap UNRWA, serta penolakan terhadap pemindahan penduduk dapat dipresentasikan sebagai

kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas domestik sekaligus sebagai kewajiban terhadap Palestina. Namun, penggunaan tekanan masyarakat sebagai modal diplomatik mempunyai batas. Pemerintah harus menunjukkan bahwa tindakannya menghasilkan pengaruh atau setidaknya manfaat konkret. Apabila pernyataan keras tidak diikuti tindakan yang terlihat, masyarakat dapat menilai diplomasi pemerintah hanya sebagai retorika. Bantuan kemanusiaan, rumah sakit lapangan, penarikan duta besar, serta penyelenggaraan konferensi internasional berfungsi mengurangi jarak antara pernyataan dan tindakan. Meskipun kebijakan tersebut tidak dapat menghentikan perang, kebijakan tersebut memberikan bukti bahwa pemerintah menggunakan instrumen yang tersedia untuk merespons krisis.

3. Hubungan antara Krisis Ekonomi dan Ketegangan Politik

Tekanan akibat perang Gaza berlangsung ketika Yordania masih menghadapi persoalan ekonomi domestik. Ketergantungan terhadap impor, keterbatasan fiskal, tingginya biaya hidup, terbatasnya kesempatan kerja, dan tekanan terhadap pelayanan publik mengurangi kemampuan pemerintah menyerap dampak konflik regional. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Yordania mencapai sekitar 2,8 persen pada 2025, tetapi tingkat pengangguran pada kuartal ketiga 2025 masih berada pada 21,4 persen. Tingkat pengangguran perempuan bahkan tercatat jauh lebih tinggi daripada pengangguran laki-laki. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa stabilitas makroekonomi belum sepenuhnya menghasilkan perbaikan pasar tenaga kerja. Perang regional juga dapat mengganggu sektor pariwisata, perdagangan, transportasi udara, investasi, dan kepercayaan pasar. Masyarakat yang menghadapi tekanan ekonomi lebih mudah memandang bantuan luar negeri dan hubungan ekonomi dengan negara Barat sebagai sumber ketergantungan politik. Pada saat yang sama, pemerintah membutuhkan dukungan eksternal untuk menjaga stabilitas fiskal dan membiayai pelayanan publik. Keadaan tersebut memperkuat dilema diplomasi Yordania. Pemerintah tidak dapat dengan mudah mengorbankan kemitraan ekonomi dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat, tetapi juga tidak dapat membiarkan kemitraan tersebut menghilangkan otonomi politiknya dalam persoalan Palestina. Karena itu, diplomasi penyeimbang diperlukan untuk mempertahankan bantuan dan investasi tanpa memberikan kesan bahwa kepentingan nasional Yordania dapat dipertukarkan dengan dukungan ekonomi.

4. Diplomasi dan Pengelolaan Identitas Nasional

Perang Gaza juga menguji kemampuan pemerintah mempertahankan identitas nasional Yordania yang inklusif. Persoalan Palestina terkadang diperdebatkan melalui pembagian antara masyarakat Transyordania dan masyarakat keturunan Palestina. Namun, pembagian tersebut tidak sepenuhnya menjelaskan mobilisasi setelah 7 Oktober 2023 karena solidaritas terhadap Gaza berkembang melintasi berbagai kelompok masyarakat. Pemerintah berkepentingan mencegah agar konflik Palestina–Israel tidak diterjemahkan menjadi pertentangan identitas di dalam negeri. Narasi resmi karena itu menekankan bahwa dukungan terhadap Palestina merupakan sikap nasional Yordania, bukan agenda satu komunitas tertentu. Pada saat yang sama, pemerintah menegaskan bahwa perlindungan terhadap Palestina harus berjalan bersama perlindungan terhadap kedaulatan dan stabilitas Yordania. Narasi ini digunakan untuk menjelaskan mengapa negara menolak pemindahan warga Palestina, tetapi juga mencegah pelanggaran perbatasan dan penggunaan wilayah Yordania sebagai arena konflik. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berusaha menghindari dua risiko. Risiko pertama adalah melemahnya solidaritas Palestina akibat penguatan nasionalisme yang eksklusif. Risiko kedua adalah penggunaan solidaritas Palestina untuk menolak legitimasi negara atau mendorong keterlibatan Yordania dalam konfrontasi militer yang tidak dapat ditanggungnya. Diplomasi penyeimbang dengan demikian mempunyai fungsi domestik sebagai instrumen pengelolaan identitas. Pemerintah berupaya menunjukkan bahwa mempertahankan Yordania dan membela hak Palestina merupakan dua kepentingan yang saling mendukung, bukan dua pilihan yang harus dipertentangkan.

Batas-Batas Efektivitas Diplomasi Yordania

Meskipun Yordania berhasil mempertahankan ruang diplomatik dan stabilitas nasional, strategi tersebut tidak sepenuhnya mampu mengubah perkembangan konflik. Terdapat sejumlah batas struktural dan operasional yang mengurangi efektivitas diplomasi Yordania.

1. Ketimpangan Kemampuan Material

Batas pertama berasal dari ketimpangan kemampuan antara Yordania dan aktor-aktor utama konflik. Yordania tidak mempunyai kekuatan ekonomi, militer, dan teknologi yang sebanding dengan Israel. Negara tersebut juga tidak memiliki kapasitas untuk memengaruhi keputusan Amerika Serikat sebagaimana Israel memengaruhi kebijakan Washington. Akibatnya, Yordania lebih banyak bergantung pada diplomasi persuasif daripada diplomasi koersif. Amman dapat menyampaikan peringatan, membangun koalisi, mendukung resolusi internasional, menarik duta besar, atau mengorganisasi bantuan. Namun, Yordania tidak dapat memaksakan penghentian operasi militer atau pembentukan negara Palestina secara sepihak. Keterbatasan tersebut menjelaskan mengapa diplomasi Yordania lebih efektif dalam mempertahankan relevansi dan melindungi stabilitas nasional daripada menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Negara kecil dapat memengaruhi perdebatan dan membentuk koalisi, tetapi hasil akhirnya tetap ditentukan oleh distribusi kekuatan yang lebih luas.

2. Ketergantungan terhadap Perlindungan Eksternal

Batas kedua adalah ketergantungan terhadap dukungan ekonomi, keamanan, dan politik dari Amerika Serikat serta mitra Barat. Dalam perspektif *external shelter*, dukungan eksternal membantu negara kecil mengatasi kerentanan yang tidak dapat ditangani hanya dengan sumber daya domestik. Namun, perlindungan tersebut juga menciptakan risiko berkurangnya otonomi kebijakan luar negeri. Hubungan Yordania dengan Amerika Serikat menunjukkan hubungan saling membutuhkan, tetapi tidak seimbang. Amerika Serikat membutuhkan Yordania sebagai mitra keamanan dan negara stabil di kawasan, sedangkan Yordania memerlukan dukungan Washington untuk pertahanan, pembangunan, anggaran, dan posisi internasional. Ketergantungan tersebut tidak menghilangkan kemampuan Yordania untuk berbeda pendapat, tetapi meningkatkan biaya dari tindakan yang terlalu konfrontatif. Pemutusan hubungan strategis dengan Amerika Serikat dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih besar bagi Yordania daripada bagi Washington. Karena itu, perbedaan kebijakan cenderung disampaikan melalui diplomasi, konsultasi tertutup, dan penolakan terhadap kebijakan tertentu daripada melalui perubahan aliansi.

3. Ketegangan antara Retorika dan Kemampuan

Batas ketiga adalah potensi kesenjangan antara ketegasan retorika dan kemampuan menghasilkan perubahan. Pemerintah Yordania secara konsisten menyampaikan penolakan terhadap pemindahan penduduk, pendudukan, perluasan permukiman, dan perubahan status quo Yerusalem. Raja Abdullah II juga kembali menegaskan bahwa posisi Yordania mengenai pemindahan, pemukiman kembali, dan gagasan tanah air alternatif tidak berubah. Namun, keberlanjutan tindakan Israel dapat menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas diplomasi tersebut. Semakin lama tidak terdapat perubahan nyata, semakin besar risiko masyarakat memandang pernyataan pemerintah sebagai simbolis. Kesenjangan ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh kegagalan Yordania. Diplomasi negara kecil bekerja dalam lingkungan yang sebagian besar ditentukan oleh negara dan aktor yang lebih kuat. Akan tetapi, kredibilitas strategi tetap bergantung pada kemampuan pemerintah menghubungkan pernyataan dengan tindakan yang dapat diamati. Karena itu, pengiriman bantuan, penarikan duta besar, pembelaan terhadap UNRWA, serta penyelenggaraan konferensi internasional bukan sekadar kegiatan tambahan. Tindakan tersebut diperlukan untuk mempertahankan kredibilitas diplomasi di tengah keterbatasan hasil politik.

4. Ketergantungan Bantuan pada Akses yang Dikendalikan Pihak Lain

Batas keempat muncul dalam diplomasi kemanusiaan. Yordania mampu mengumpulkan, mengirimkan, dan mengoordinasikan bantuan. Namun, masuknya bantuan ke Gaza tetap bergantung pada pembukaan perlintasan, pemeriksaan keamanan, kondisi jalan, aktivitas militer, serta persetujuan pihak-pihak yang menguasai akses. Penerjunan udara dapat menjangkau wilayah tertentu, tetapi volume bantuan yang dibawa jauh lebih kecil daripada kebutuhan penduduk. Jalur udara tidak dapat menggantikan konvoi darat dalam operasi kemanusiaan skala besar. Dengan demikian, diplomasi kemanusiaan dapat meringankan sebagian penderitaan, tetapi tetap terikat pada struktur penguasaan wilayah dan akses. Keterbatasan tersebut juga menciptakan dilema citra. Pemerintah dapat mempresentasikan penerjunan bantuan sebagai tindakan langsung, tetapi masyarakat dan organisasi kemanusiaan dapat mempertanyakan efektivitasnya apabila jalur darat tetap terhambat. Karena itu, Yordania harus menggabungkan bantuan operasional dengan tekanan diplomatik untuk membuka akses darat yang aman dan berkelanjutan.

5. Meluasnya Konflik Regional

Batas kelima adalah risiko perluasan perang. Konflik Gaza berkembang bersamaan dengan eskalasi antara Israel dan Hezbollah, serangan kelompok bersenjata dari Irak dan Suriah, konflik di Laut Merah, serta pertukaran serangan Israel–Iran. Perkembangan tersebut menempatkan Yordania di antara beberapa lintasan konflik. Yordania berkepentingan mencegah wilayah udara dan daratnya digunakan untuk menyerang negara lain. Namun, tindakan mempertahankan kedaulatan dapat ditafsirkan sebagian masyarakat sebagai bantuan tidak langsung kepada salah satu pihak. Sebaliknya, membiarkan wilayah Yordania digunakan oleh aktor bersenjata dapat menyeret Kerajaan ke dalam konflik yang tidak dapat dikendalikannya. Diplomasi penyeimbang menjadi semakin sulit ketika konflik berubah dari perang terbatas di Gaza menjadi konfrontasi regional. Semakin banyak aktor yang terlibat, semakin kecil kemampuan Yordania mempertahankan hubungan yang terpisah antara dukungan terhadap Palestina, keamanan nasional, dan kemitraan strategis.

6. Tidak Tersedianya Penyelesaian Politik yang Dapat Diterapkan

Batas keenam adalah lemahnya jalur politik menuju solusi dua negara. Yordania secara konsisten mempertahankan solusi tersebut, tetapi implementasinya menghadapi perluasan permukiman, perpecahan politik Palestina, perubahan politik domestik Israel, lemahnya tekanan internasional, dan hilangnya kepercayaan antara pihak-pihak yang berkonflik. Diplomasi Yordania dapat mempertahankan solusi dua negara sebagai norma internasional, tetapi tidak dapat mewujudkannya tanpa dukungan dan tindakan dari aktor lain. Kondisi ini menempatkan Amman dalam situasi defensif: mempertahankan agar opsi negara Palestina tidak sepenuhnya hilang, meskipun peluang implementasinya semakin sempit. Penolakan terhadap pemindahan warga Palestina menjadi sangat penting dalam kondisi tersebut. Apabila solusi politik belum dapat diwujudkan, Yordania setidaknya berusaha mencegah tindakan yang akan membuat solusi tersebut mustahil secara permanen. Pemindahan penduduk tidak hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan, tetapi juga meningkatkan polarisasi dan ketidakstabilan kawasan.

Evaluasi terhadap Proposisi Analitis

Temuan penelitian mendukung proposisi pertama bahwa meningkatnya ketidakpastian regional mendorong Yordania mempertahankan kemitraan strategis tanpa mengambil posisi yang sepenuhnya sama dengan mitranya. Yordania tidak meninggalkan hubungan dengan Amerika Serikat, tetapi secara terbuka berbeda mengenai perang Gaza, pemindahan warga Palestina, dan kebijakan Israel. Temuan juga mendukung proposisi kedua bahwa meningkatnya tekanan domestik dan risiko pemindahan warga Palestina mendorong ketegasan diplomasi normatif. Penarikan duta besar, penolakan terhadap pemindahan, pembelaan terhadap Yerusalem, serta kecaman terhadap operasi militer mencerminkan hubungan antara tekanan domestik dan kebijakan luar negeri.

Proposisi ketiga juga memperoleh dukungan. Keterbatasan kemampuan material mendorong Yordania menggunakan diplomasi kemanusiaan, forum multilateral, dukungan terhadap UNRWA, dan Penjagaan Hasyimiyah sebagai instrumen pengaruh. Instrumen tersebut tidak menggantikan kekuatan militer, tetapi memungkinkan Yordania mempertahankan relevansi dan legitimasi. Namun, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa diplomasi penyeimbang mempunyai tujuan yang berbeda pada setiap tingkat. Pada tingkat nasional, strategi tersebut diarahkan untuk mempertahankan keamanan, stabilitas, bantuan eksternal, dan legitimasi. Pada tingkat regional, strategi diarahkan untuk mencegah pemindahan warga Palestina, mempertahankan status Yerusalem, dan membatasi perluasan konflik. Pada tingkat internasional, strategi diarahkan untuk mempertahankan solusi dua negara dan meningkatkan tekanan kemanusiaan.

Perbedaan tujuan tersebut menjelaskan mengapa efektivitas strategi tidak dapat dinilai hanya berdasarkan berakhir atau tidaknya perang Gaza. Diplomasi Yordania dapat dianggap relatif berhasil dalam menjaga negara tetap stabil, meskipun tidak berhasil memaksa berakhirnya perang atau mewujudkan negara Palestina.

Kontribusi Teoretis: Diplomasi Penyeimbang Negara Kecil

Temuan penelitian memberikan tiga kontribusi terhadap kajian diplomasi negara kecil dan *strategic hedging*. Pertama, *hedging* negara kecil tidak harus berlangsung di antara dua kekuatan besar yang bersaing. Dalam kasus Yordania, penyeimbangan berlangsung di antara beberapa kepentingan, yaitu kemitraan dengan Amerika Serikat, hubungan dengan Israel, solidaritas terhadap Palestina, hubungan Arab, keamanan wilayah, dan legitimasi domestik. Kedua, diplomasi penyeimbang tidak hanya terdiri atas kombinasi kerja sama dan persaingan. Strategi tersebut juga mencakup penggunaan norma, kemanusiaan, identitas, dan tanggung jawab historis. Yordania mengompensasi kelemahan material melalui reputasi moderat, bantuan kemanusiaan, perlindungan pengungsi, dan kedudukannya di Yerusalem. Pola ini sesuai dengan temuan kajian negara kecil bahwa kerentanan dapat diubah menjadi modal diplomatik apabila negara mampu mengkhususkan perannya. Ketiga, politik domestik bukan hanya faktor pembatas, tetapi juga sumber daya dalam diplomasi. Tekanan masyarakat dapat mempersempit ruang kompromi pemerintah, tetapi juga memperkuat argumentasi Yordania ketika berhadapan dengan mitra eksternal. Hal ini menegaskan relevansi kerangka *two-level games*, yaitu bahwa keputusan diplomatik harus dapat dipertahankan pada tingkat internasional dan domestik secara bersamaan.

Berdasarkan temuan tersebut, diplomasi penyeimbang negara kecil dapat didefinisikan sebagai strategi untuk mengelola ketimpangan kekuatan dan kepentingan yang saling bertentangan melalui kombinasi kerja sama strategis, diferensiasi kebijakan, diversifikasi hubungan, mobilisasi norma, serta pengelolaan legitimasi domestik. Strategi tersebut tidak bertujuan menciptakan keseimbangan kekuatan yang setara. Tujuan utamanya adalah mempertahankan ruang pilihan, mencegah ketergantungan berubah menjadi kepatuhan penuh, dan mengurangi risiko yang timbul dari keberpihakan yang terlalu tegas.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi Yordania pasca-7 Oktober 2023 merupakan strategi penyeimbang yang aktif, bukan bentuk netralitas pasif. Yordania secara konsisten menolak pemindahan paksa warga Palestina, mendukung solusi dua negara, mempertahankan Penjagaan Hasyimiyah atas situs-situs suci di Yerusalem, serta mengecam operasi militer yang menimbulkan penderitaan warga sipil. Sikap tersebut dijalankan tanpa memutus hubungan strategis dengan Amerika Serikat maupun membatalkan Perjanjian Damai Yordania–Israel 1994. Strategi ini diterapkan melalui empat instrumen utama, yaitu mempertahankan kemitraan keamanan, ekonomi, dan politik dengan negara-negara Barat; melakukan diferensiasi diplomatik terhadap kebijakan mitra; mendiversifikasi hubungan

dengan negara-negara Arab, Islam, Eropa, dan organisasi internasional; serta menjalankan diplomasi normatif dan kemanusiaan melalui bantuan, rumah sakit lapangan, dukungan terhadap UNRWA, koridor bantuan, dan konferensi internasional. Penolakan terhadap pemindahan warga Palestina menjadi pusat strategi tersebut karena berkaitan dengan perlindungan hak Palestina sekaligus kepentingan keamanan nasional.

Diplomasi penyeimbang Yordania juga dipengaruhi oleh tekanan domestik berupa solidaritas masyarakat terhadap Palestina, demonstrasi, dan tuntutan penghentian hubungan dengan Israel. Meskipun demikian, pemerintah tetap membatasi mobilisasi yang dianggap dapat mengganggu stabilitas nasional atau menyeret Yordania ke dalam konflik regional. Strategi ini relatif berhasil dalam menjaga stabilitas negara, melindungi perbatasan, mempertahankan dukungan eksternal, dan mencegah keterlibatan langsung dalam perang. Namun, efektivitasnya dalam menyelesaikan konflik Palestina–Israel masih terbatas karena Yordania belum mampu menghentikan perang, mengubah kebijakan Israel secara mendasar, atau mewujudkan solusi dua negara. Keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh ketimpangan kekuatan, ketergantungan ekonomi, dukungan Amerika Serikat terhadap Israel, lemahnya jalur politik, dan perluasan konflik regional. Dengan demikian, diplomasi Yordania menunjukkan bahwa negara kecil dapat mempertahankan ruang otonomi dan keberpihakan normatif melalui strategi penyeimbang, meskipun ruang tersebut terbatas dan sangat bergantung pada kemampuan mengelola tekanan internasional serta domestik secara bersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Balci, A. (2025). Where small powers travel? Understanding Jordan's high-level diplomatic visit patterns. *Political Studies Review*, 23(4), 961–976. <https://doi.org/10.1177/14789299241279037>
- Chaziza, M., & Lutmar, C. (2026). Jordan's niche diplomacy: Reframing middle-power agency in the 21st-century Middle East. *World*, 7(2), Article 25. <https://doi.org/10.3390/world7020025>
- Cooper, A. F. (Ed.). (1997). *Niche diplomacy: Middle powers after the Cold War*. Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-25902-1>
- Department of Statistics. (2025, December 15). *Unemployment rate declined in the Kingdom to 16.2%*. <https://dosweb.dos.gov.jo/category/news/unemployment-rate/>
- Gonzalez-Pujol, I. (2024). Theorising the hedging strategy: National interests, objectives, and mixed foreign policy instruments. *All Azimuth: A Journal of Foreign Policy and Peace*, 13(2), 193–214. <https://doi.org/10.20991/allazimuth.1480020>
- Jordan Armed Forces–Arab Army. (2024a, September 26). *Jordan Armed Forces carries out aid airdrop to south Gaza*. <https://www.jaf.mil.jo/NewsViewEn.aspx?NewsId=42089>
- Jordan Armed Forces–Arab Army. (2024b, May 31). *The 100th airdrop of the Arab Army for our people*. <https://www.jaf.mil.jo/ArticleEn.aspx?ArticleId=70>
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Kuik, C.-C. (2021). Getting hedging right: A small-state perspective. *China International Strategy Review*, 3(2), 300–315. <https://doi.org/10.1007/s42533-021-00089-5>
- Ministry of Foreign Affairs and Expatriates. (2023, November 1). *Jordan recalls its ambassador from Tel Aviv immediately* [Press release]. <https://www.mfa.gov.jo/news/81309>
- Ministry of Foreign Affairs and Expatriates. (2024a, June 11). *Call for action: Urgent humanitarian response for Gaza* [Conference document]. <https://mfa.gov.jo/Gaza/index.html>
- Ministry of Foreign Affairs and Expatriates. (2024b, June 11). *Jordan welcomes Security Council resolution supporting a ceasefire agreement* [Press release]. <https://mfa.gov.jo/news/161337>
- Ministry of Foreign Affairs and Expatriates. (2025a, September 5). *Jordan condemns statements by Israeli government extremists on the displacement of Palestinians* [Press release]. <https://www.mfa.gov.jo/news/214215>
- Ministry of Foreign Affairs and Expatriates. (2025b, March 23). *Jordan strongly condemns Israel's announcement establishing a special agency to displace Palestinians from Gaza* [Press release]. <https://www.mfa.gov.jo/news/212764>

- NAMA Strategic Intelligence Solutions, & Konrad-Adenauer-Stiftung. (2025, October). *Trends in shifting perceptions of Jordanians: Foreign Relations Survey—Wave V*. <https://www.kas.de/documents/279984/0/Trends%2Bin%2Bshifting%2Bperceptions%2B-%2BForeign%2BRelations%2BSurvey%2B%281%29.pdf/6951c729-c9f7-5fbf-b046-9a5f26f07a84>
- Ponižilová, M. (2013). The regional policy and power capabilities of Jordan as a small state. *Central European Journal of International and Security Studies*, 7(1), 82–102. <https://cejiss.org/the-regional-policy-and-power-capabilities-of-jordan-as-a-small-state>
- Putnam, R. D. (1988). Diplomacy and domestic politics: The logic of two-level games. *International Organization*, 42(3), 427–460. <https://doi.org/10.1017/S0020818300027697>
- Reuters. (2024, March 29). *Jordanians protest against peace treaty with Israel in fresh rallies*. <https://www.reuters.com/world/middle-east/jordanians-protest-against-peace-treaty-with-israel-fresh-rallies-2024-03-29/>
- Royal Hashemite Court. (n.d.). *Custodianship of holy sites*. <https://kingabdullah.jo/en/hashemites/custodianship>
- Royal Hashemite Court. (2023, October 31). *King discusses dangerous situation in Gaza with Biden, urges immediate humanitarian truce*. <https://kingabdullah.jo/en/news/king-discusses-dangerous-situation-gaza-biden-urges-immediate-humanitarian-truce>
- Royal Hashemite Court. (2024, October 11). *King calls for effective international response to humanitarian catastrophe in Gaza*. <https://kingabdullah.jo/en/news/king-calls-effective-international-response-humanitarian-catastrophe-gaza>
- Ryan, C. R. (2024). The impact of the Gaza war on Jordan’s domestic and international politics. In *The war on Gaza and Middle East political science* (POMEPS Studies No. 51, pp. 69–73). Project on Middle East Political Science. https://pomeps.org/wp-content/uploads/2024/04/POMEPS_Studies_51_Web-1.pdf
- The Jordan Times. (2022, September 17). *Jordan-US MoU reflects “close, strategic and historic” partnership—Shraideh*. <https://jordantimes.com/news/local/jordan-us-mou-reflects-%E2%80%98close-strategic-and-historic%E2%80%99-partnership-%E2%80%94shraideh>
- Thorhallsson, B., Steinsson, S., & Kristinsson, T. (2018). The small state in international relations. In B. Thorhallsson (Ed.), *Small states and shelter theory: Iceland’s external affairs* (pp. 13–23). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429463167>
- Treaty of Peace Between the State of Israel and the Hashemite Kingdom of Jordan*, Israel–Jordan, October 26, 1994, 2042 U.N.T.S. 351.
- Tsourapas, G. (2019). The Syrian refugee crisis and foreign policy decision-making in Jordan, Lebanon, and Turkey. *Journal of Global Security Studies*, 4(4), 464–481. <https://doi.org/10.1093/jogss/ogz016>
- United Nations High Commissioner for Refugees. (n.d.). *UNHCR Jordan*. Retrieved July 27, 2026, from <https://www.unhcr.org/jo/>
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2024, March 8). *Humanitarian needs and response update: 27 February–4 March 2024*. <https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-needs-and-response-update-27-february-4-march-2024>
- United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. (n.d.). *Where we work: Jordan*. Retrieved July 27, 2026, from <https://www.unrwa.org/where-we-work/jordan>
- United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. (2024, July 12). *Statement of shared commitments on UNRWA*. <https://www.unrwa.org/resources/un-unrwa>
- United Nations Security Council. (2024, June 10). *Resolution 2735 (2024) (S/RES/2735)*. United Nations Digital Library. <https://digitallibrary.un.org/record/4051310>
- U.S. Department of State. (2022, September 16). *Joint statement on the signing of the bilateral memorandum of understanding on strategic partnership between the United States and the Hashemite Kingdom of Jordan*. <https://2021-2025.state.gov/joint-statement-on-the-signing-of-the-bilateral-memorandum-of-understanding-on-strategic-partnership-between-the-united-states-and-the-hashemite-kingdom-of-jordan/>
- World Bank. (n.d.). *Jordan*. Retrieved July 27, 2026, from <https://www.worldbank.org/ext/en/country/jordan>

- World Food Programme. (2024, March 5). *WFP food deliveries to northern Gaza face further setbacks*.
<https://www.wfp.org/news/wfp-food-deliveries-northern-gaza-face-further-setbacks>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.